

SEJARAH SINGKAT KOTA PEMATANGSIANTAR

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Pematangsiantar merupakan daerah kerajaan. Pematangsiantar berkedudukan di Pulau Holing dengan raja terakhir dari dinasti ini adalah keturunan marga Damanik yaitu T. Nawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun 1906.

Di Pulau Holing, sekitar Pulau Holing, kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk diantaranya adalah Suhi Haluan, Siantar Bayu, Suhi Kahean, Pantoan, Suhi Bah Bosar, dan Tomuan. Daerah tersebut kemudian menjadi daerah hukum Kota Pematangsiantar yaitu :

1. Pulau Holing menjadi Kampung Pematang
2. Siantar Bayu menjadi Kampung Pusat Kota
3. Suhi Kahean menjadi Kampung Sipinggol-pinggol, Kampung Melayu, Sukadame, dan Bane.
4. Suhi Bah Bosar menjadi Kampung Kristen, Karo, Tomuan, Pantoan, Timbang Galung, dan Martimbang.

Setelah Belanda memasuki daerah Sumatera Utara, daerah Simalungun dan daerah kekuasaan Belanda sehingga pada tahun 1907 berakhir kekuasaan Belanda. Kontrol Belanda yang semula berkedudukan di Perdagangan, pada tahun 1907 dipindahkan ke Pematangsiantar. Sejak itu Pematangsiantar berkembang menjadi kota yang banyak dikunjungi pendatang baru antara lain Bangsa Cina yang mendiami Timbang Galung dan Kampung Melayu.

Pada tahun 1910 didirikan Badan Persiapan Kota Pematangsiantar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Stad Blad No. 285 Pematangsiantar berubah menjadi Gemeente yang mempunyai otonomi sendiri. Sejak Januari 1939 berdasarkan Stad Blad No. 717 berubah menjadi Gemeente yang mempunyai Dewan. Pada zaman

Setelah Proklamasi kemerdekaan, Pematangsiantar kembali menjadi Daerah Otonomi. Berdasarkan Undang-undang No.22/1948 Status Gemeente menjadi Kabupaten Simalungun dan Walikota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai 1957.

Berdasarkan UU No.1/1957 berubah menjadi Kota Praja Penuh dan dengan keluarnya Undang-undang No.18/1965 berubah menjadi Kota, dan dengan keluarnya Undang-undang No. 5/1974 tentang-Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah berubah menjadi Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar sampai sekarang.

Berdasarkan PeraturanPemerintah No.35 Tahun 1981 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar terbagi atas empat wilayah kecamatan yang terdiri atas desa/kelurahan dengan luas wilayah 12,48 km² yang peresmiannya dilaksanakan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 1982.Kecamatan tersebut yaitu:

1. KecamatanSiantar Barat
2. KecamatanSiantarTimur
3. KecamatanSiantar Utara
4. KecamatanSiantar Selatan

BerdasarkanPeraturanPemerintah No. 15 tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantardiperluasmenjadi 6 wilayahkecamatan, dimana desa/kelurahan dariwilayahKabupatenSimalungunmasukmenjadiwilayah Pematangsiantar, sehingga Kota Pematangsiantarterdiridari desa/kelurhandenganluaswilayahmenjadi 70,230 km². Kecamatan tersebut yaitu:

1. KecamatanSiantar Barat
2. KecamatanSiantarTimur
3. KecamatanSiantar Utara

6. Kecamatan Siantar Martoba

Selanjutnya, pada tanggal 23 Mei
dikeluarkan kesepakatan bersama Penyesuaian Batas Wilayah Administrasi
Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungundengan SKB

No: $\frac{136/3140/1994}{136/4620/1994}$. Adapun hasil kesepakatan tersebut adalah wilayah

Pematangsiantar menjadi seluas 79,9706 km².

Pada tahun 1997 Wilayah Administrasi di
Pematangsiantar mengalami perubahan status sesuai dengan SK yang meliputi :

- SK Gubsu No. 140. 050. K/ 97 tertanggal 13 Pebruari 1997 dan direalisasikan
Walikota KDH Tk II Kota Pematangsiantar No.140/1961/Pem/97 tertanggal 15 /
tentang: Pembentukan Lima Kelurahan Persiapan Di Kec. Siantar Martoba
- SK Gubsu No.140/ 2610. K/95 tertanggal 4 Oktober 1995 serta direalisasikan
Wali Kota KDH Tk II Kota Pematangsiantar No.140/ 1961 /Pem /97 tertanggal 2
tentang Perubahan Status 9 (Sembilan) Desa Menjadi Kelurahan. Sehingga pada
wilayah administrasi Kota Pematangsiantar menjadi 43 Kelurahan.

Pada tahun 2007, diterbitkan 5 Peraturan
tentang pemekaran wilayah administrasi Kota Pematangsiantar yaitu:

1. Peraturan Daerah No.3 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan
Sitalasari
2. Peraturan Daerah No.6 Tahun
tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Marimbun
3. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bah Sor
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
tentang Pembentukan Kelurahan Tanjung Tengah, Naga Pitudan Tanjung Pinggi
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

DengandemikianjumlahKecamatan di Kota Pematangsiantaradaseb
8(delapan) kecamatandenganjumlahkelurahansebanyak 53 (limapuluhtiga) Kelurahan